

Desain dan Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah se-Jawa dan Bali Tahun 2013 dan 2014

Nur Dewi Natrini

dewi.natrini@gmail.com

Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.d., Ak., CA.

irwanritonga@ugm.ac.id

ABSTRACTS

The financial condition of the government, according to some researchers provide an overview of the government's ability to meet its obligations in the form of debt or fulfillment services in a timely manner. Through an assessment of the financial condition of the local government can figure out how to meet the needs of the public, how to use the resources, and how to process the resources so that more productive. The Indonesian government itself through DJPK has performed an analysis of financial condition using the method of Brown (1993), although there are some drawbacks. Therefore, this study also develop indicators of financial condition in accordance Brown (1993) that has been modified in accordance with the conditions of government in Indonesia. The means used to develop indicators in this study by comparing the GASB 34 with SAP PP No. 71 of 2010 and SAP PP No. 24 of 2005 and coupled with the study of literature and expert validation. Results from this comparison was obtained on 10 indicators of financial condition in accordance with the conditions or the policy of the Government of Indonesia. The purpose of the analysis was to assess the financial condition of financial condition are balanced in each local government. Therefore, this study uses clustering techniques dikembangkan by Baidori (2015).

Keywords: analysis of financial condition, clusters, indicators

1. Pendahuluan

Otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah setempat. Pelaksanaan otonomi daerah

membuat terjadinya aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Syahrudin, 2006). Tahun 2015 transfer dana ke daerah mengalami kenaikan sebesar Rp647 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp596,5 triliun (Direktorat Jenderal Anggaran, 2015).

Transfer dana APBN ke daerah dipergunakan untuk mengoptimalisasi peranan pemerintah daerah dalam membina dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan, baik antarprovinsi dengan instansi vertikal, antar instansi vertikal, dan antar kabupaten atau kota (PP No. 19 Tahun 2010). Akan tetapi, pemerintah pusat hanya menyediakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tanpa ada aturan terperinci mengenai pengelolaannya (Ritonga dkk, 2012a). Sebagai hasilnya, setiap daerah memiliki program dan kegiatan yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah (Prita, 2015). Perbedaan program dan kegiatan yang terjadi pada masing-masing daerah akan menyebabkan perbedaan dalam pengalokasian anggaran (Ritonga dkk, 2012a, 2012b). Terjadinya perbedaan alokasi anggaran tersebut akan menghasilkan kondisi keuangan yang berbeda-beda antarpemerintah daerah (Ritonga dkk, 2012a, 2012b).

Kondisi keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya baik dalam bentuk hutang ataupun pemenuhan pelayanan secara tepat waktu (Wang dkk, 2007 dan Kioko, 2013). Pentingnya pengukuran kondisi keuangan diilustrasikan oleh Wang dan Liou (2009) sebagai pengecekan kesehatan pada manusia, kesehatan atas kondisi keuangan sebuah organisasi sangatlah kompleks dan multidimensi sehingga setiap perubahan dari salah satu kondisi keuangan akan berdampak pada bagian lain. Melalui penilaian atas kondisi keuangan maka pemerintah daerah dapat mengetahui bagaimana cara memenuhi kebutuhan publik, bagaimana menggunakan sumber daya, dan bagaimana memproses sumber daya sehingga lebih produktif (Williams, 2003).

Akan tetapi, penilaian atas kondisi keuangan tidak memiliki sistem yang

dapat digunakan secara umum (Wang dkk, 2007). Terdapat banyak metoda dalam mengukur kondisi keuangan dari berbagai macam literatur, diantaranya Ritonga dkk (2012a), Wang dan Liou (2009), Brown (1993), Maher dan Nollenberger (2009) melakukan revisi atas *10-point test* milik Brown (1993), Rivenbark dan Roenigk (2011), Maher (2013). Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) juga telah melakukan analisis kondisi keuangan pemerintah daerah (DJPk, 2013). Analisis tersebut menggunakan metode Brown (1993) yang telah dimodifikasi berdasarkan kondisi dan informasi yang tersedia di Indonesia. DJPK dalam melakukan kondisi keuangan menggunakan 9 indikator dan membagi pemerintah daerah menggunakan pengelompokan yang berbeda antar kabupaten dan kota. Akan tetapi, pengelompokan untuk provinsi tidak dilakukan dengan kriteria tertentu.

Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan indikator baru dengan menggunakan alat analisis indikator Brown (1993) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Hasil dari indikator tersebut digunakan untuk mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah se-Jawa dan Bali. Akan tetapi, untuk menghasilkan analisis kondisi keuangan yang seimbang maka penelitian ini menggunakan teknik kluster yang dikembangkan oleh Baidori (2015). Hal tersebut sejalan dengan Zafra-Gómez (2009) yang menyatakan bahwa apabila model pengukuran kondisi keuangan dilengkapi dengan penerapan analisis kluster, yaitu mengelompokkan pemerintah daerah ke dalam karakteristik sosio ekonomi yang mirip, maka hasil evaluasi kondisi keuangan akan jauh lebih efektif.

2. Kajian Pustaka

2.1 Definisi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Secara utuh kondisi keuangan digambarkan sebagai *cash solvency*, *budgetary solvency*, *longrun solvency*, dan juga *service solvency* (Groves dkk, 1981). Kondisi keuangan secara luas didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban baik dalam bentuk hutang maupun pelayanan secara berkesinambungan atau tepat waktu (Kioko, 2013; Wang dkk, 2007;

Hendrick, 2004). Hal yang sama diungkapkan oleh Hruza (2015), bahwa menyediakan pelayanan dan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat merupakan peranan pemerintah yang tidak tergantikan di era demokrasi modern. Beberapa peneliti memiliki istilah yang berbeda-beda mengenai kondisi keuangan diantaranya

Tabel 1. Istilah Kondisi Keuangan

Peneliti	Istilah
Crosby dan Robbin (2013)	<i>Fiscal Health</i> , memiliki arti sebagai penentu utama atas kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya.
Cabaleiro dkk (2012) dan Cuadro-Ballestros dkk (2013)	<i>Financial Health</i> , digambarkan sebagai persyaratan utama dalam memenuhi tujuan dari institusi dimanapun.
Kloha dkk (2005) dan Trussel dan Patrick (2009)	<i>Fiscal Distress</i> , digambarkan sebagai kondisi yang mengancam kemampuan pemerintah daerah untuk melayani warga negara dan mempertahankan fungsi publik yang dianggap penting
Brusca dkk (2015)	<i>Financial Sustainability</i> , diartikan sebagai kemampuan dalam mengelola pendapatan yang diharapkan serta memprediksi resiko keuangan jangka panjang tanpa memengaruhi berkurangnya pendapatan atau pengeluaran yang berlebihan.

2.2 Model Pengukuran Keuangan *10-point test* Brown

Brown (1993) merupakan alat ukur yang digunakan oleh DJPK dalam menilai kondisi keuangan pemerintah

daerah di Indosia. Brown melakukan pengukuran kondisi keuangan secara cepat yang menggunakan 10 poin rasio

keuangan pemerintah daerah dengan populasi kurang dari 100.000 orang. Alat tes tersebut dibangun dengan spesifik untuk memberikan alat ukur yang lebih terarah mengenai kondisi keuangan kepada pemerintah daerah yang lebih kecil (Rivenbark dan Roenigk, 2011). Sepuluh rasio yang digunakan oleh Brown (1993) terdiri dari 4 faktor dasar keuangan yang terdiri dari *revenue* (rasio 1-3), *expenditures* (rasio 4), *operation position* (rasio 5-7), dan *debt structure* (rasio 8-10) (Ritonga, 2014; Maher dan Nollenberger, 2009).

Kekuatan dari model *10-point test* Brown (1993) terletak pada *benchmarking*. Perbandingan tersebut dilihat dari pemeringkatan yang dilakukan oleh Brown dari pemerintah daerah yang paling buruk sampai paling baik menurut kelompok masing-masing (Rivenbark dan Roenigk, 2011; Rivenbark dkk, 2010). Brown sendiri memiliki argumen bahwa *10-poin test* merupakan alat yang efektif untuk menilai kondisi keuangan pemerintah tanpa menggunakan teknik analisis yang mahal, memakan banyak waktu, atau kompleks (Kioko, 2013). Pengukuran Kondisi keuangan Brown terdiri dari 3 tahapan, antara lain:

1. Menghitung 10 rasio keuangan berdasarkan data dalam laporan keuangan tahunan
2. Membandingkan rasio antarpemerintah daerah berdasarkan ukuran populasi yang sama. Brown (1993) mengklasifikasikan kota dengan membentuk empat kategori

berikut: (1) kota dengan jumlah penduduk antara 50.000-100.000 jiwa, (2) kota dengan jumlah penduduk antara 30.000-50.000 jiwa, (3) kota dengan jumlah penduduk antara 15.000-30.000 jiwa, dan (4) kota dengan jumlah penduduk dibawah 15.000 jiwa.

3. Melakukan pemeringkatan kondisi keuangan daerah berdasarkan klasifikasi pada tahap kedua, dari pemerintah daerah yang paling baik sampai dengan paling buruk.

2.3 Hasil Klaster Baidori (2015) dalam Konteks Indonesia

Analisis konsisi keuangan pemerintah daerah akan lebih bermakna dan bermanfaat jika pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok dengan karakteristik yang sama (Priyambodo dan Ritonga, 2014). Data dalam proses pembentukan klaster yang dikembangkan Baidori (2015) ialah delapan variabel komponen penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu jumlah penduduk; luas wilayah; Indeks Pembangunan Manusia; Indeks Kemahalan Kontruksi; PDRB per kapita; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak; dan Dana Bagi Hasil Penerimaan Sumber Daya Alam. Berdasarkan hasil klaster Baidori (2015) terbentuk 5 klaster di kelompok kota dan 6 klaster di kelompok kabupaten. Berikut penjabaran dari masing-masing klaster baik kota dan kabupaten.

Tabel 2 Klaster kota

Klaster 1	Batu	Klaster 2	Blitar
	Mojokerto		Cilegon
	Pasuruan		Denpasar
	Probolinggo		Madiun
	Semarang		Magelang

	Serang		Pekalongan
	Tasikmalaya		Salatiga
Klaster 4	Bandung		Surakarta
	Banjar		Tangerang
	Bekasi		Tangerang Selatan
	Bogor		Tegal
	Cimahi		Yogyakarta
	Cirebon	Klaster 3	Surabaya
	Depok	Klaster 5	Kediri
	Malang		
	Sukabumi		

Tabel 3 Klaster kabupaten

Klaster 1	Bandung Barat	Kendal	Purbalingga	Klaster 2	Bandung	
	Bangli	Klaten	Purwakarta		Banyuwangi	
	Banjarnegara	Klungkung	Purworejo		Cianjur	
	Bantul	Kudus	Rembang		Garut	
	Banyumas	Kulon Progo	Semarang		Jember	
	Batang	Kuningan	Serang		Malang	
	Blitar	Lamongan	Situbondo		Sukabumi	
	Blora	Lebak	Sleman		Tasikmalaya	
	Bondowoso	Lumajang	Sragen		Klaster 3	Badung
	Boyolali	Madiun	Subang		Klaster 4	Bangkalan
	Brebes	Magelang	Sukoharjo	Pamekasan		
	Buleleng	Magetan	Sumedang	Sampang		
	Ciamis	Majalengka	Tabanan	Sumenep		
	Cirebon	Mojokerto	Tegal	Klaster 5	Bekasi	
	Demak	Nganjuk	Temanggung		Bogor	
	Grobogan	Ngawi	Trenggalek		Cilacap	
	Gunung Kidul	Pacitan	Tuban		Gresik	
	Jembrana	Pandeglang	Tulungagung		Indramayu	
	Jepara	Pati	Wonogiri		Karawang	
	Jombang	Pasuruan	Wonosobo		Sidoarjo	
Karanganyar	Pekalongan		Tangerang			
Karangasem	Pemalangan		Klaster 6	Bojonegoro		
Kebumen	Ponorogo					
Kediri	Probolinggo					

3. Metoda Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif dikarenakan peneliti memiliki tujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah dengan membangun indikator kondisi keuangan daerah terlebih dahulu. Oleh Karena itu, penelitian ini menggunakan model pendekatan pengembangan. Hal tersebut dijelaskan oleh Sugiyono (2015) bahwa metode penelitian dan

pengembangan, ialah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dalam upaya mengembangkan produk yang telah ada (inovasi) maupun untuk menciptakan produk baru yang telah teruji.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Creswell (2014) selama proses penelitian, peneliti dapat mengumpulkan

dokumen-dokumen kualitatif berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, e-mail). Data penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD di Jawa dan Bali tahun 2010-2014 LKPD, data publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), RPJMD, dan RKPD di 121 pemerintah daerah.

Penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan pengembangan produk berupa indikator keuangan yang baru dan pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah se-Jawa dan Bali dengan menggunakan tahapan analisis pada Brown (1993). Penjabaran tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Analisis metode pengukuran kondisi keuangan yang digunakan oleh Brown (1993) dengan mencari persamaan akun-akun yang ada pada laporan keuangan di Indonesia dengan didasari telaah literatur. Berdasarkan tahapan tersebut diperoleh pengukuran kondisi keuangan yang baru dan akan divalidasi dengan ahli.
2. Menghitung rasio yang didasarkan pada laporan keuangan tahunan maupun data dukung lainnya
3. Membandingkan rasio antarpemerintah daerah yang didasarkan pada klaster Baidori (2015). Dalam membandingkan rasio, masing-masing pemerintah daerah setiap klaster akan diklasifikasikan kedalam 4 kuartil sebagai berikut:
 - a. Kuartil 1 (0-25%) memperlihatkan bahwa pemerintah daerah dalam klaster tertentu memiliki rasio yang buruk menurut peringkat mereka.
 - b. Kuartil 2 (25%-50%) memperlihatkan bahwa pemerintah daerah dalam klaster tertentu memiliki rasio yang baik menurut peringkat mereka.
 - c. Kuartil 3 (50%-70%) memperlihatkan bahwa pemerintah daerah dalam klaster tertentu memiliki rasio yang lebih baik menurut peringkat mereka.
 - d. Kuartil 4 (70%-100%) memperlihatkan bahwa pemerintah daerah dalam klaster tertentu memiliki rasio yang paling baik menurut peringkat mereka.
4. Melakukan grade atau pemeringkatan atas kondisi keuangan daerah berdasarkan skala yang ada pada Brown (1993). Skala tersebut dirancang untuk memungkinkan pemerintah daerah dengan rasio di atas 50% (kuartil 3 ke atas) memperoleh skor keseluruhan yang positif. Artinya, pemerintah daerah dengan mayoritas rasio diatas 50% memiliki kondisi finansial yang lebih baik dari pemerintah daerah dengan mayoritas rasio dibawah 50% (Brown, 1993). Pemerintah daerah dengan rasio antara 50%-70% (kuartil 3) akan menerima skor keseluruhan sembilan poin dari sembilan indikator kondisi keuangan. Sedangkan pemerintah daerah dengan rasio antara 25%-50% (kuartil 2) akan memperoleh skor keseluruhan nol (0), dan pemerintah daerah dengan rasio 0-25% (kuartil 1) akan

memperoleh skor keseluruhan negatif (-9) dari indikator kondisi keuangan yang baru.

5. Penentuan kondisi keuangan atas kondisi keuangan pemerintah daerah yang

terdapat pada setiap klaster. Brown (1993) menyimpulkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah dijelaskan sesuai dengan skala penilaian yang dirincikan sebagai berikut

Tabel 4 Skala Penilaian Kondisi Keuangan

Skor keseluruhan	Skala penilaian relatif terhadap keseluruhan pemerintah daerah
10 atau lebih	Di antara yang paling baik
5 sampai dengan 9	Lebih baik daripada kebanyakan kota lain
1 sampai dengan 4	Rata – rata
0 sampai dengan -4	Lebih buruk daripada kebanyakan kota lain
-5 atau kurang	Di antara yang paling buruk

4. Hasil Riset dan Diskusi

4.1 Indikator Kondisi Keuangan Versi Pemerintah Indonesia

Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Bali diukur dengan menggunakan indikator yang telah dimodifikasi mengacu pada alat ukur yang dibangun oleh Brown (1993). Pemodelan indikator kondisi keuangan memiliki tujuan agar alat ukur yang digunakan sesuai dengan kondisi keuangan di Indonesia. Jika Brown (1993) dalam membangun indikator menggunakan

laporan keuangan Amerika yang didasari oleh GASB no 34 maka penelitian ini menggunakan SPAP baik PP 71 tahun 2010 maupun PP 24 tahun 2005 serta peraturan yang terkait.

Berikut penjabaran 10 indikator kondisi keuangan yang dibangun untuk digunakan dalam mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Bali:

Tabel 5 Penjabaran Indikator Baru

Rasio Brown (1993)	LK. Amerika	LK.Indonesia	Rasio Baru versi Indonesia
Rasio 1: Total Revenues / Population	Total Pendapatan merupakan total dari seluruh pendapatan yang terdapat pada laporan Governmental funds. Pendapatan pada laporan tersebut terbagi menjadi 4 kelompok yaitu General Fund, Capital Projects Fund, General Debt Service Fund, Nonmajor Governmental Fund	PP 24 Tahun 2005 dan PP 71 Tahun 2010 membagi pendapatan kedalam jenis atau sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.	Rasio 1: (Total Pendapatan - DAK) / Populasi Interpretasi: Rasio tinggi, menunjukkan kemampuan yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan tambahan
Rasio 2: Total General Funds Revenue from	Akun general fund form own resources menurut laporan Pemerintah Amerika, ialah:	UU No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang	Rasio 2 : PAD / (PAD+DBH+DAU+Pendapatan bagi Hasil pajak

Rasio Brown (1993)	LK. Amerika	LK.Indonesia	Rasio Baru versi Indonesia
own sources / Total General Revenue	Taxes (Real estate, Sales and use, Personal income, Other) Akun general revenue menurut laporan Pemerintah Amerika, terdiri dari: Taxes (Real estate, Sales and use, Personal income, Other), Federal, State, and another categorical aid, Charges for services, Investment income, Other Revenues	diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan. General revenue versi Amerika diterjemahkan pada laporan keuangan Pemerintah Indonesia menjadi PAD, Dana Bagi Hasil, Pendapatan bagi hasil pajak dan lainnya provinsi, dan DAU.	Provinsi) Interpretasi: Rasio tinggi, menunjukkan pemerintah tidak bergantung pada organisasi pemerintah eksternal
Rasio 3: General Fund sources from other funds / Total general fund sources	Akun General Fund Sources from other funds terdiri dari: Principal Amount bond issued, Transfer from General debt service fund, dan Transfer From Nonmajor Debt Services Fund	Pendapatan daerah diluar pendapatan asli daerah menurut PP 24 tahun 2005 ialah Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) dan Lain-lain Pendapatan yang sah.	Rasio 3 : (DBH+DAU+Pendapatan bagi Hasil pajak Provinsi+Lain-lain pendapatan yang sah) / (PAD+DBH+DAU+Pendapatan bagi Hasil pajak Provinsi) Interpretasi: Rasio rendah, menunjukkan pemerintah tidak pada transfer operasi untuk membiayai operasional pemerintahan umum
Rasio 4: Operating expenditures / Total Expenditures	Akun Operating expenditures terdiri atas: General Government, Public safety and Judicial, Education, City University, Social Services, Environmental protection, Transportation Services, Parks, recreation, and cultural activities Akun Total Expenditure terdiri atas: General Fund, Capital Projects Fund, General Debt Services Fund.	PP 71 tahun 2010, mendeskripsikan belanja operasional sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat Jk. Pendek. Belanja menurut PP 71 Tahun 2010 dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.	Rasio 4: Belanja Operasional / Total Belanja Interpretasi: Rasio rendah, menunjukkan bahwa infrastruktur terjaga dengan baik
Rasio 5: Total Revenues / Total Expenditures	Akun Total Revenues dan Total Expenditures terdiri atas: General Fund, Capital Projects Fund, General Debt Services Fund, Non Major Governmental Fund.	Akun pendapatan pada laporan keuangan Pemerintah Indonesia terdiri dari: PAD, Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.	Rasio 5: (Total Pendapatan – DAK) / (Total Belanja-DAK) Interpretasi: Rasio tinggi, menunjukkan pemerintah daerah mengalami ekuitas positif antar perioda
Rasio 6:	Rumus unreserved general	Akun Unreserved Fund	(PAD + DBH+ DAU+

Rasio Brown (1993)	LK. Amerika	LK.Indonesia	Rasio Baru versi Indonesia
Unreserved general fund balance / Total general Revenue	fund balance versi Amerika ialah Revenue – Expenditure – Other Financing Uses – Other Financing Sources + Fund Balance at the Beginning Year (Hanya akun-akun yang berada dalam general fund)	Balance versi Indonesia ialah: PAD + DBH+ DAU+ Pendapatan bg. Hasil pajak dan lainnya provinsi –Biaya Operasional + Unreserved Fund Balance versi Indonesia tahun sebelumnya.	Pendapatan bg. Hasil pajak dan lainnya provinsi –Biaya Operasional + Unreserved Fund Balance versi Indonesia tahun sebelumnya) / (PAD + DBH + DAU + Pendapatan bg. Hasil + Lain-lain pendapatan yang sah). Interpretasi: Rasio tinggi, menunjukkan adanya sumber daya yang dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan sementara kewajiban jangka pendek
Rasio 7: Total general cash and investments / Total General Fund Liabilities	Akun General Fund – Balance Sheet: Cash and Cash equivalent, dan Investment. Total General Fund Liabilities: Accounts payable and accrued liabilities, Accrued tax refunds, Accrued judgments and claims, Due to component units, Estimated disallowanced of federal state and other aid, dan Other liabilities.	Akun pada neraca laporan keuangan di Indonesia: Kas dan setara kas, investasi jk. Pendek, Utang perhitungan fihak ketiga, Bagian lancar utang dalam negeri, Utang jk. Pendek lainnya, Bagian lancar panjang lainnya.	Rasio 7: (Kas + Investasi Jk. Pendek) / Kewajiban Jk. Pendek Interpretasi: Rasio tinggi, menunjukkan kecukupan kas dan setara kas yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek
Rasio 8: General Fund Liabilities / Total General Fund Revenues	Akun total General fund liabilities ialah: Accounts payable and accrued liabilities, Accrued tax refunds, Accrued judgments and claims, Due to component units, Other liabilities, Estimated disallowanced of federal, state, and other aid Akun general fund revenue: Taxes (Real estate, Sales and use, Personal income, Other), Federal, State, and Another Categorical Aid, Charges for Services, Investment income, Other Revenue	Akun kewajiban lancar: Utang perhitungan fihak ketiga, Utang bunga, Bagian lancar utang dalam negeri, Utang jangka pendek lainnya, Bagian lancar panjang lainnya Akun general revenue: PAD, DBH, DAU, Pendapatan bagi hasil pajak dan lainnya provinsi	Rasio 8: Kewajiban Jangka Pendek/ (PAD+DBH+DAU+Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi) Interpretasi: Rasio rendah, menunjukkan kewajiban jk. Pendek dapat dilayani oleh aliran normal dari pendapatan tahunan
Rasio 9: Debt Services / Total Revenues	Akun General debt services funds ialah Administrative and other dan Debt services	Berdasarkan SAP, belanja bunga pada laporan keuangan Pemerintah Indonesia	Rasio 9: Belanja Bunga / (Total Pendapatan – DAK)

Rasio Brown (1993)	LK. Amerika	LK.Indonesia	Rasio Baru versi Indonesia
	(Interest and Redemptions). Akun total Revenue terdiri atas General Fund, Capital Projects Fund, General Debt Services Fund, Non Major Governmental Fund.	merupakan bagian dari belanja operasional. Akun Total pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	Intrepretasi: Rasio rendah, menunjukkan bahwa pemerintah mampu membayar persyaratan hutang ketika jatuh tempo
Rasio 10: Direct Long Trem Debt / Populasi	Akun Noncurrent Liabilities terdiri atas Bonds and Note Payable Due within one year dan Bonds and Note Payable. Akun Hutang Jk. Panjang pada rasio 10 disajikan dalam neraca net position pada Laporan keuangan Amerika	Akun pada laporan keuangan Pemerintah Indonesia ialah Kewajiban jangka panjang (utang luar negeri, utang dalam negeri- sektor perbankan, utang dalam negeri obligasi, Premium (diskonto) obligasi, utang jk. Panjang lainnya)	Rasio 10: Hutang Jk. Panjang / Populasi Interpretasi: Rasio rendah, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk membayar kembali utang jangka panjang

4.2 Skoring Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Skoring merupakan langkah ketiga setelah perhitungan masing-masing rasio pada semua pemerintah daerah di setiap klaster. Nilai skoring didapatkan dari hasil klasifikasi indikator keuangan pada 4 kuartil yang telah ditentukan sesuai dengan tahapan

Brown (1993). Sebagai contoh penentuan skor berdasarkan rasio kondisi keuangan tahun 2014 pada Kabupaten Pamekasan yang merupakan anggota dari klaster 4 pemerintah kabupaten.

Tabel 6
Contoh Perhitungan Skor Kabupaten Pamekasan Tahun 2014

No	Rasio	Poin untuk setiap kuartil				Skor
		Q1 (0-25%)	Q2 (25%-50%)	Q3 (50%-75%)	Q4 (75%-100%)	
		-1	0	1	2	
1	Rasio 1				2	2
2	Rasio 2				2	2
3	Rasio 3				2	2
4	Rasio 4	-1				-1
5	Rasio 5				2	2
6	Rasio 6		0			0
7	Rasio 7		0			0
8	Rasio 8	-1				-1
9	Rasio 9				2	2
10	Rasio 10				2	2
Total Skor						10

Berdasarkan Tabel 6 maka Kabupaten Pamekasan memiliki total skor 10. Total skor kemudian diinterpretasikan berdasarkan peringkat kondisi keuangan yang dibangun oleh Brown (1993). Kabupaten Pamekasan memperoleh total skor 10 sehingga dapat diartikan kondisi keuangan di tahun 2014 ialah paling baik. Penentuan skor untuk menggambarkan kondisi keuangan berlaku bagi pemerintah kota dan kabupaten pada masing-masing klaster.

4.3 Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Tahun 2013-2014

Analisis kondisi keuangan pemerintah kota di wilayah Jawa-Bali memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan kondisi keuangan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik klaster yang dibangun oleh Baidori (2015) dengan membagi pemerintah kota kedalam lima klaster berdasarkan kriteria sosio ekonomi. Berdasarkan lima klaster yang dibangun oleh Baidori (2015) terdapat dua klaster yang tidak dapat dianalisis menggunakan model Brown (1993). Klaster tersebut adalah klaster 3 dan klaster 5 yang hanya terdiri dari 1 kota saja yaitu Surabaya dan Kediri. Berikut salah satu contoh analisis kondisi keuangan pemerintah kota

Tabel 7
Skor Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Tahun 2013 dan 2014
(Klaster 1)

No	Pemerintah Kota	Skor	
		2013	2014
1	Batu	8	6
2	Mojokerto	7	8
3	Pasuruan	6	10
4	Probolinggo	11	11
5	Semarang	9	5
6	Serang	4	2
7	Tasikmalaya	4	7

Keterangan:

	Paling Baik
	Lebih Baik
	Rata-Rata
	Lebih Buruk
	Paling Buruk

* Penjabaran rasio lihat pada lampiran

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa dari tujuh kota terdapat empat kota yang konsisten dengan kondisi keuangan selama dua tahun meskipun terdapat beberapa kota yang mengalami penurunan skor tetapi masih dikelompok yang sama, antara

lain: Batu, Mojokerto, Semarang, dan Probolinggo. Kota Probolinggo memperoleh skor tertinggi pada klaster 1 dengan jumlah 11 baik di tahun 2013 dan 2014. Kota Probolinggo memiliki skor tertinggi akan tetapi pada penilaian permasing-masing skor pada

setiap rasio di tahun 2013 dan 2014 terdapat skor -1 pada rasio 4 (lihat lampiran). Hal tersebut memberikan arti bahwa Kota Probolinggo kurang baik dalam memelihara infrastruktur dikarenakan belanja operasional lebih mendominasi diantara komponen total belanja.

Pada klaster 1 terdapat dua kota yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Kota Pasuruan dari kondisi keuangan lebih baik dengan skor 6 menjadi paling baik di tahun 2014 dengan skor 10 begitu pula dengan Tasikmalaya dengan skor 4 menjadi skor 7 di tahun 2014. Peningkatan kondisi keuangan Kota Pasuruan didukung adanya kenaikan peringkat pada rasio 7 dan rasio 1. Kenaikan pada rasio 1 menggambarkan bahwa Kota Pasuruan mampu memperoleh pendapatan tambahan dengan adanya potensi populasi yang dimiliki. Rasio 7 menggambarkan tingkat kecukupan Pemerintah Kota Pasuruan dalam membayar hutang jangka pendek melalui kecukupan kas yang dimiliki. Peningkatan kondisi keuangan kota Tasikmalaya didukung kenaikan rasio 2 dan rasio 5. Rasio 2 menggambarkan

adanya peningkatan kemandirian pemerintah kota Tasikmalaya dalam mengandalkan PAD (pendapatan asli daerah) sebagai sumber pendapatan. Peningkatan pada rasio 5 memiliki makna bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki ekuitas positif.

Penurunan kondisi keuangan yang cukup signifikan juga terjadi pada klaster 1. Pemerintah Kota Semarang mengalami penurunan dari skor 9 menjadi 5 meskipun masih dalam kelompok dengan kondisi keuangan lebih baik. Penurunan Kota Semarang secara signifikan terjadi pada rasio 5 dan rasio 7. Rasio 5 menggambarkan bahwa Kota Semarang mengalami penurunan pendapatan sehingga terjadi penurunan pada ekuitas meskipun masih bernilai positif. Penurunan pada rasio 7 mengindikasikan bahwa terjadinya penurunan kecukupan kas dalam membayar kewajiban jangka pendek.

Kondisi keuangan pemerintah kota pada klaster 1 secara dominan berada dalam kelompok lebih baik yang terdiri dari tiga kota, yaitu Batu, Mojokerto, dan Semarang. Kelompok terendah pada klaster 1 berada di posisi rata-rata yang di tempati Kota Serang.

4.4 Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten 2013-2014

Hasil dari pengklasteran pemerintah daerah tingkat kabupaten diperoleh 6 klaster yang terdiri dari 91 kabupaten. Akan tetapi, dari 6 klaster hanya 4 klaster yang bisa di kuartilkan dan dianalisis dengan menggunakan model pengukuran kondisi keuangan

Brown (1993). Hal tersebut disebabkan klaster 3 dan 6 hanya terdiri dari 1 kabupaten yaitu Badung dan Bojonegoro. Berikut contoh dari salah satu analisis pemerintah kabupaten tahun 2013-2014.

Tabel 8
Skor Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun 2013 dan 2014
(Klaster 2)

No	Pemerintah Kabupaten	Skor	
		2013	2014
1	Bandung	11	8

No	Pemerintah Kabupaten	Skor	
		2013	2014
2	Banyuwangi	11	12
3	Cianjur	6	6
4	Garut	1	1
5	Jember	8	11
6	Malang	6	8
7	Sukabumi	5	0
8	Tasikmalaya	8	10

Keterangan:

	Paling Baik
	Lebih Baik
	Rata-Rata
	Lebih Buruk
	Paling Buruk

* Penjabaran rasio lihat pada lampiran

Tabel 8 menunjukkan kondisi keuangan pemerintah kabupaten dalam klaster 2 selama tahun 2013 dan 2014. Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui kabupaten yang konsisten dengan kondisi keuangan ialah Kabupaten Banyuwangi dengan kondisi keuangan paling baik dan Kabupaten Cianjur dengan kondisi keuangan lebih baik. Selain kedua kota tersebut, Kabupaten Garut juga memiliki kondisi keuangan yang konsisten hanya saja berada dalam kelompok rata-rata dengan skor 1.

Pada klaster 2 terdapat dua kabupaten yaitu Bandung dan Sukabumi yang mengalami penurunan kondisi keuangan yang mengakibatkan perubahan kelompok kondisi keuangan. Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari kelompok paling baik menjadi lebih baik dengan skor akhir 8. Perubahan tersebut diakibatkan penurunan rasio 1 dan rasio 4 dengan skor masing-masing -1. Penurunan pada rasio 1 memberikan gambaran bahwa dengan adanya penambahan populasi di Kabupaten Bandung, sedikit memberikan

kontribusi pada pendapatan daerah jika dibandingkan kabupaten pada klaster 2. Hal yang sama pada penurunan rasio 4 yang memberikan gambaran bahwa infrastruktur kurang terpelihara dengan baik dikarenakan tingginya alokasi belanja operasional dari total belanja jika dibandingkan dengan kabupaten pada klaster 2.

Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dua peringkat kelompok kondisi keuangan yang sebelumnya lebih baik menjadi lebih buruk. Hal tersebut diakibatkan penurunan pada rasio 1, rasio 2, rasio 3, dan rasio 5 yang hampir semuanya memiliki skor -1 kecuali rasio 1 dengan skor 0. Selain mengalami penurunan yang signifikan, Kabupaten Sukabumi juga menempati kondisi keuangan terendah pada klaster 2. Penurunan pada rasio 2 dan 3 memiliki pengertian bahwa adanya ketergantungan terhadap sumber dari luar organisasi dalam mendanai operasional pemerintah daerah jika dibandingkan dengan kabupaten di klaster 2. Penurunan pada rasio memberikan gambaran bahwa

Kabupaten Sukabumi tidak mengalami ekuitas positif antar perioda jika dibandingkan dengan kabupaten di klaster 2.

5. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan 7 klaster yang telah dilakukan analisis maka diperoleh hasil yang bervariasi meskipun setiap klaster memiliki kesamaan kondisi sosio ekonomi. Variasi kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia disebabkan otonomi daerah dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah setempat. Hal tersebut sejalan dengan Ritonga dkk (2012a dan 2012b) perbedaan program dan kegiatan yang terjadi pada masing-masing daerah akan menyebabkan perbedaan dalam pengalokasian anggaran. Terjadinya perbedaan alokasi anggaran tersebut akan menghasilkan kondisi keuangan yang berbeda-beda antarpemerintah daerah (Ritonga dkk, 2012a dan 2012b).

Oleh karena itu, kondisi keuangan masing-masing klaster pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Pemerintah kota dengan tiga klaster diperoleh kondisi keuangan pada masing-masing klaster sebagai berikut:
 - a. Klaster 1, terdiri dari tujuh pemerintah kota dengan skor kondisi keuangan tertinggi 11 dan yang terendah 2 pada tahun 2014. Mayoritas pemerintah kota pada klaster 1 memiliki kondisi keuangan lebih baik dengan jumlah tiga

kota. Kelompok terendah pada klaster 1 berada dalam kondisi keuangan rata-rata yang diperoleh Kota Semarang.

- b. Klaster 2, terdiri dari 12 pemerintah kota dengan skor kondisi keuangan tertinggi 14 dan terendah -5 di tahun 2014. Klaster 2 memiliki kondisi keuangan yang variasinya cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan empat kota memiliki kondisi keuangan paling baik dan dua kota memiliki kondisi yang paling buruk di tahun 2014. Kondisi keuangan yang konsisten atau memiliki skor yang sama selama dua periode tidak didapati pada klaster ini.
 - c. Klaster 4, terdiri dari sembilan pemerintah kota dengan skor kondisi keuangan tertinggi 10 dan terendah -2 di tahun 2014. Kondisi keuangan tertinggi yaitu paling baik diperoleh tiga kota sedangkan kondisi keuangan paling buruk diperoleh satu kota. Kota Cimahi selama dua tahun berturut-turut memperoleh kondisi keuangan paling buruk meskipun di tahun 2014 mengalami kenaikan 1 poin dari -3 menjadi -2.
2. Pemerintah kabupaten dengan empat klaster diperoleh kondisi keuangan pada masing-masing klaster sebagai berikut:
 - a. Klaster 1, terdiri dari 69 kabupaten memiliki skor tertinggi kondisi keuangan sebesar 19 diperoleh Kabupaten Mojokerto dan yang terendah sebesar -8 diperoleh kabupaten Ciamis. Terdapat lima kabupaten dengan kondisi keuangan yang konsisten yaitu Serang, Purworejo, Nganjuk, Gunung

Kidul, dan Ponorogo. Kabupaten yang mengalami kondisi keuangan konsisten, 4 diantaranya masuk dalam kelompok paling baik dan satu kabupaten dengan kondisi rata-rata. Secara keseluruhan kondisi keuangan pada klaster 1 berada pada kelompok lebih baik.

- b. Klaster 2, terdiri dari delapan kabupaten memiliki skor tertinggi kondisi keuangan sebesar 12 yang diperoleh Kabupaten Banyuwangi dan terendah sebesar 0 yang diperoleh Kabupaten Sukabumi. Secara keseluruhan pada klaster ini terdapat tiga kabupaten yang memiliki kondisi keuangan paling baik dan tiga yang rata-rata di tahun 2014. Hal tersebut meningkat dari tahun 2013 yang hanya memiliki dua kabupaten dengan kondisi paling baik.
- c. Klaster 4, terdiri dari empat kabupaten dengan skor kondisi keuangan tertinggi 13 dan yang terendah -4. Pada klaster ini tidak terdapat kabupaten yang kondisi keuangannya konsisten selama dua periode. Hal tersebut dibuktikan dari keempat kabupaten mengalami perubahan kondisi keuangan baik yang meningkat maupun menurun.
- d. Klaster 5, terdiri dari delapan kabupaten memiliki skor kondisi keuangan tertinggi 16 dan terendah -1. Pada klaster ini terdapat satu kabupaten yang kondisi keuangannya konsisten hanya saja termasuk dalam kondisi keuangan lebih buruk. Secara keseluruhan di

tahun 2014 mayoritas kondisi keuangan pada klaster 5 ialah paling baik.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan diskusi yang dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sekaligus saran bagi pelaksanaan penelitian berikutnya sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya dua tahun saja dalam melakukan analisis kondisi keuangan pemerintah daerah se-Jawa dan Bali. Seyogyanya penelitian berikutnya dapat menggunakan informasi keuangan selama lebih dari dua tahun untuk melengkapi analisis kondisi keuangan pemerintah daerah.
- b. Validasi penelitian ini masih terbatas pada validasi ahli yang dikhususkan pada dosen pembimbing. Hal tersebut disebabkan keterbatasan waktu dan akses peneliti dalam melibatkan pihak lain untuk melakukan validasi ahli. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperkaya penelitian ini dengan menggunakan *focus group discussion* (FGD) dan validasi ahli selain dosen pembimbing semisal: DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) dan Pemerintah Daerah serta melibat.
- c. Penelitian ini hanya terbatas pada Pemerintah Daerah di Jawa dan Bali yang hanya mempresentasikan 20% dari pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan penelitian berikutnya untuk memperluas objek penelitian guna memperkaya analisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidori 2015, 'Pengklastran Pemerintah Daerah di Jawa dan Bali Berdasarkan Variabel Sosio ekonomi (Komparasi Laporan keuangan Daerah)', *Thesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Brown, KW 1993, The 10-Point Test of Financial Condition: Toward an Esay-to-Use Assessment Tool for Smaller Cities. *Government Finance Review*, vol. 9, no. 6, pp. 21-26.
- Brusca, I, Rossi, FM, Aversano, N 2015, Drivers for the Financial Condition of Local Government: A Comparative Study Between Italy and Spain. *Lex Localis- Journal of Local Self Government*, vol.13, no.2, pp.161-184
- Cabaleiro, R, Buch, B, Vaamonde, A 2012, Developing a Method to Assessing the Municipal Financial Health. *American Review of Public Administration*, vol.43, no.6, pp.729-751.
- Creswell, JW 2014, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th Edition, *Sage Publications*, California.
- Crosby, A, dan Robbins, D 2013, Mission Impossible: Monitoring Municipal Fiscal Sustainability and Stress in Michigan. *J.of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management*, vol.23, no.3, pp.522-555.
- Cuadrado-Ballesteros, B, Mordan, N, Garcia-Sanchez, IM 2014, Is Local Financial Health Associated with Citizens Quality of Life? *Soc Indic Res*, vol.119, pp.559-580
- Direktorat Jenderal Anggaran 2015, Budget In Brief APBN 2015. Direktorat Penyusunan Anggaran Republik Indonesia.
- DJPK 2013, Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan- Kementerian Keuangan.
- GASB 1999, Statement No.34 of the Governmental Accounting Standars Board, Norwalk.
- Groves, SM, Godsey,WM, and Shulman, MA 1981, Financial Indicators for Local Government. *Public Budgeting and Finance*.
- Hendrick, R 2004, Assessing and Measuring the Fiscal Health of the Local Governments Focus on Chicago Suburban Municipalities. *Urban Affairs Review*, vol.40, no.1, pp.78-114
- Hruza, F 2015, Public Sector Organization Financial Ratios Recent Development as a Metter of Financial Innovation. *Investment Management and Financial Innovations*, vol.12, no.2, pp. 88-93.
- Kioko, SN 2013, Reporting on the Financial Condition of the States 2002-2010. *Jurnal of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management*, vo.25, no.1, pp165-198.
- Maher, CS, dan Nollenberger, K 2009. Revisiting Kenneth Brown's "10-Point Test."

- Government Finance Review*, vol. 25, no. 5, pp. 61-66.
- Maher, CS 2013, Measuring Financial Condition: An Essential Element of Management During Periods of Fiscal Stress, *The Journal of Government Financial Management*, pp. 20.
- Prita, AD 2015. 'Analisis Kondisi Keuangan Berdasarkan Model Brown'. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Republik Indonesia 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
- Republik Indonesia 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Ritonga, I, Clark, C, dan Wickremasinghe, G 2012a. Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: An Exploration. *Municipal and Public Finance*, vol. 1, no. 2, pp. 37-50.
- _____. 2012b, "Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia": <http://www.apira2013.org/proceedings/pdfs/K159.pdf>.
- Ritonga, I 2014, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Lembaga Kajian manajemen Pemerintah Daerah, Yogyakarta
- Rivenbark, WC, Roenigk, DJ, Allison, GS 2010, Conceptualizing Financial Condition in Local Government, *Journal of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management*, vol.22, no. 2, pp. 149-177.
- Rivenbark, WC, dan Roenigk, DJ 2011, Implementation of Financial Condition Analysis in Local Government, *Public Administration Quarterly*, vol.35, no.2, pp. 241-267.
- Sugiyono 2015, Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development), Alfabeta: Bandung.
- Syahrudin, 2006, Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi yang Konsisten.
- Trussel, JM, dan Patrick, PA 2009, A Predictive Model of Fiscal Distress in Local Government, *Journal of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management*, vol.21, no.2, pp.578-616.
- Wang, X, Dennis, L, dan Tu, YSJ 2007, Measuring financial condition: A Study of US states, *Public Budgeting & Finance*, vol. 27, no. 2, pp. 1-21.
- Wang, X dan Liou, KT 2009, Assessing the Change in Financial Condition: An Analysis of Panel Data From U.S.States, *Public Budgeting and Finance*, vol.21, no.2, pp.165-197.

Williams, DW 2003, Measuring Government in the Early Twentieth Century, *Public Administration Review*, vol. 63, no.6, pp. 643-659.

Zafra-Gomez, JL, Lopez-Hernandez, AM, Hernandez-Bastida, A 2009, Evaluating Service

Quality and Minimizing the Effects of the Socioeconomic Environment: An Application to Spanish Municipalities. *The American Review of Public Administration*, vol.39, no.4, pp.425-449.